



**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH  
AGUNG NOMOR 4985 K/PID.SUS/2022 TERKAIT PERAMPASAN  
ASET SEBAGAI PEMBAYARAN UANG PENGGANTI**

**TESIS**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2026**

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG  
NOMOR 4985 K/PID.SUS/2022 TERKAIT PERAMPASAN ASET SEBAGAI  
PEMBAYARAN UANG PENGGANTI**

Oleh : Hafiz Aulia

Tim Pembimbing:

Prof. Dr. Ismansyah, SH. MH (Pembimbing I) dan Dr. Nani Mulyati, SH, MCL  
(Pembimbing II)

**ABSTRAK**

Ketentuan hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mencerminkan Upaya Pemberantasan Korupsi secara tuntas, khususnya dalam aspek pemulihan Kerugian Keuangan Negara. Hal ini menjadi tidak efektif apabila tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa barang bukti berupa harta benda (aset) dirampas untuk negara guna membayar uang pengganti, tidak dipertimbangkan dalam putusan hakim yang menyatakan bahwa barang bukti berupa harta benda (aset) terdakwa tidak tepat diperhitungkan sebagai bagian dari pembayaran uang pengganti, sehingga menimbulkan implikasi terhadap mekanisme Perampasan Aset dalam rangka Pemulihan Kerugian Negara. Hal ini terlihat dalam perkara atas nama terpidana Tursiwan Bin Kasmadi, sebagaimana tercantum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 4985 K/Pid.Sus/2022 tanggal 11 September 2022. Rumusan masalah penelitian ini adalah; (1) Apa Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 4985 K/Pid.Sus/2022 Yang Menyatakan Aset Terdakwa Tidak Tepat Diperhitungkan Sebagai Pembayaran Uang Pengganti? (2) Bagaimana Implikasi Pertimbangan Hakim Terhadap Mekanisme Perampasan Aset Sebagai Instrumen Pemulihan Kerugian Negara? Karena penelitian ini menganalisis Pertimbangan Hakim Terhadap Mekanisme Perampasan Aset Sebagai Instrumen Pemulihan Kerugian Negara, maka penelitian ini masuk kategori penelitian hukum yuridis normatif. Data penelitian dilakukan dengan pendekatan *statute*, *case*, dan *conceptual*. Wawancara bisa dijadikan data pendukung (*empiris kualitatif*), tetapi bukan pendekatan utama. Dari penelitian dapat disimpulkan bahwa Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 4985 K/Pid.Sus/2022 tersebut cenderung bersifat formalistik dan belum sepenuhnya mengakomodasi semangat pemulihan kerugian keuangan negara sebagai tujuan utama penjatuhan pidana tambahan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi sehingga Putusan tersebut berpotensi melemahkan optimalisasi *asset recovery* yang berdampak pada berkurangnya efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi.

**Kata kunci;** *Perampasan Aset, Uang Pengganti. Tindak Pidana Korupsi*

**JUDICIAL REASONING IN SUPREME COURT DECISION NO. 4985  
K/PID.SUS/2022 REGARDING ASSET FORFEITURE AS SATISFACTION OF  
SUBSTITUTE COMPENSATION PAYMENT**

By: Hafiz Aulia

*Advisory Team:*

Prof. Dr. Ismansyah, SH. MH (Pembimbing I) dan Dr. Nani Mulyati, SH, MCL  
(Pembimbing II)

**ABSTRACT**

The imposition of additional penalties in the form of payment of replacement money, as regulated in Article 18 paragraph (1) letter b, paragraphs (2), and (3) of Law Number 31 of 1999 as amended by Law Number 20 of 2001 on the Eradication of Criminal Acts of Corruption, reflects comprehensive efforts to eradicate corruption, particularly in recovering state financial losses. However, these efforts become ineffective when the Public Prosecutor's demands requesting that confiscated assets be applied toward the payment of replacement money are not considered in the judge's decision. Instead, the court may determine that the defendant's assets are not appropriately calculated as part of the replacement money, thereby creating implications for the asset confiscation mechanism in the context of state loss recovery. This issue is illustrated in the case of the convict Tursiwan bin Kasmadi, as decided in Supreme Court Decision Number 4985 K/Pid.Sus/2022 dated September 11, 2022. The research problems addressed in this study are: (1) What constitutes the basis of the judges' considerations in Supreme Court Decision Number 4985 K/Pid.Sus/2022 in determining that the defendant's assets cannot be calculated as replacement money? and (2) What are the implications of such judicial considerations for the asset confiscation mechanism as an instrument for recovering state financial losses? Given that this study analyzes judicial considerations concerning asset confiscation as a mechanism for state loss recovery, it constitutes normative juridical legal research. The research employs statutory, case, and conceptual approaches. Interviews may be used as supporting qualitative empirical data but do not serve as the primary method of analysis. The findings indicate that the judges' considerations in Supreme Court Decision Number 4985 K/Pid.Sus/2022 tend to be formalistic and do not fully accommodate the spirit of recovering state financial losses as the primary objective of imposing additional penalties in corruption cases. Consequently, this decision has the potential to weaken the optimization of asset recovery and reduce the deterrent effect against perpetrators of corruption.

**Keywords:** *Asset Confiscation; Replacement Money; Corruption*